

OPTIMALISASI PERAN KLINIK BUMDES MELALUI PENDAMPINGAN PENYUSUNAN BUSINESS PLAN BERBASIS POTENSI LOKAL DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Optimizing the Role of BUMDes Clinics through Mentorship in Developing Local Potential-Based Business Plans in West Sumbawa Regency

Daeva Mubarika Raisa^{1*}, Nurliah Buhari², Andi Chairil Ichsan³, Kurniawan Yuniarto⁴, Azhar Mustafid⁴, Susi Rahayu⁵

¹Program Studi Agribisnis Universitas Mataram, ²Program Studi Ilmu Kelautan, Universitas Mataram, ³Program Studi Kehutanan, Universitas Mataram, ⁴Program Studi Teknik Pertanian Universitas Mataram, ⁵Program Studi Fisika Universitas Mataram

Jalan Majapahit No. 62 Mataram, NTB, Indonesia.

Alamat korespondensi : mubarikadaeva@staff.unram.ac.id

Artikel history :	Received	: 10 September 2025	DOI : https://doi.org/10.29303/pepadu.v6i4.8454
	Revised	: 25 Oktober 2025	
	Published	: 30 Desember 2025	

ABSTRAK

Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Sumbawa Barat melalui kegiatan pendampingan penyusunan rencana bisnis (business plan) berbasis potensi lokal. Metode yang digunakan meliputi identifikasi sumber daya desa, pelaksanaan lokakarya rencana bisnis, penyelenggaraan diskusi kelompok terpumpun (focus group discussion) dengan para pemangku kepentingan, serta pemberian pendampingan intensif dalam penyusunan dokumen rencana bisnis. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pengetahuan dan keterampilan pengelola BUMDes, terutama dalam merancang strategi bisnis, melakukan analisis pasar, menyusun proyeksi keuangan, serta memahami pentingnya tata kelola yang transparan dan akuntabel. Dokumen rencana bisnis yang dihasilkan tidak hanya berfungsi sebagai panduan operasional, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk memperkuat posisi BUMDes sebagai penggerak ekonomi desa. Evaluasi lebih lanjut menekankan bahwa keberhasilan program tidak hanya terletak pada produk dokumen yang dihasilkan, tetapi juga pada implementasi strategi bisnis yang relevan secara kontekstual dan berkelanjutan. Dengan demikian, Klinik BUMDes berperan sebagai mitra strategis dalam memperkuat kapasitas institusional, meningkatkan daya saing, serta mendorong kemandirian ekonomi desa..

Kata kunci : Badan Usaha Milik Desa, Klinik BUMDes, rencana bisnis, potensi lokal, pemberdayaan masyarakat

ABSTRACT

This community service program aims to enhance the capacity of Village-Owned Enterprises (BUMDes) managers in West Sumbawa Regency through mentoring activities on the preparation of a business plan based on local potential. The methods employed included identifying village resources, conducting business plan workshops, organizing focus group discussions with stakeholders, and providing intensive assistance in drafting the business plan document. The results indicate significant improvements in the knowledge and skills of BUMDes managers, particularly in designing business

strategies, conducting market analysis, preparing financial projections, and understanding the importance of transparent and accountable governance. The business plan documents produced serve not only as operational guidelines but also as strategic instruments to strengthen BUMDes as drivers of the local village economy. The evaluation further highlights that success lies not only in producing the documents but also in implementing contextually relevant and sustainable business strategies. Therefore, the BUMDes Clinic acts as a strategic partner in strengthening institutional capacity, enhancing competitiveness, and fostering village economic independence.

Keywords: Village-Owned Enterprises, BUMDes Clinic, business plan, local potential, community empowerment

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi dan pembangunan daerah pedesaan di Indonesia. BUMDes, yang dibentuk oleh pemerintah untuk memperkuat stabilitas keuangan desa, berupaya memanfaatkan sumber daya lokal dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan beragam kegiatan komersial (Hestiana, 2024; Nizla Rohaya, 2021). Pembentukan badan usaha ini bukan semata-mata upaya ekonomi; melainkan terkait dengan kebijakan sosial dan politik yang lebih luas yang dirancang untuk mendorong otonomi dan keberlanjutan desa, sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Desa tahun 2014 (Nizla Rohaya, 2021).

BUMDes merupakan sarana penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes bertindak sebagai penggerak ekonomi lokal dengan mengelola potensi desa secara inovatif. Akan tetapi, pengelolaan keuangan yang kurang optimal sering menjadi penghalang tercapainya tujuan ini. Padahal, inovasi dalam memanfaatkan potensi desa sangat berperan dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan ekonomi lokal. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mempunyai peran krusial dalam memajukan kesejahteraan dan ekonomi di desa. BUMDes didirikan untuk mengoptimalkan potensi yang ada di desa, sekaligus membuka kesempatan bagi warga untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi yang dikelola secara mandiri (Muzayyin Maq, Puspita Dewi, Suningrat, & Wilson Sitopu, 2024). BUMDes pada dasarnya dirancang sebagai motor penggerak ekonomi desa dengan memanfaatkan potensi lokal secara inovatif. Namun, kelemahan dalam pengelolaan keuangan sering menghambat pencapaian tujuan tersebut. Kondisi ini menegaskan pentingnya strategi inovasi dan partisipasi masyarakat agar BUMDes benar-benar mampu mendorong pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan.

Keberhasilan badan usaha ini bergantung pada beberapa faktor, termasuk keterlibatan masyarakat, tingkat keterampilan sumber daya manusia yang mengelola BUMDes, dan dukungan pemerintah yang memadai. Sebagai contoh, penelitian telah mengidentifikasi bahwa banyak BUMDes menghadapi tantangan dalam berkontribusi terhadap pendapatan desa karena kemampuan manajerial yang tidak memadai dan konflik kepentingan antar pemangku kepentingan (Zainullah Hasan, et al., 2022).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan instrumen kunci dalam pembangunan ekonomi desa, sesuai dengan arahan Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015. Dengan diadopsinya BUMDes sebagai lembaga ekonomi yang dimiliki dan dikelola oleh desa, upaya pengelolaan terhadap potensi lokal menjadi sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUMDes yang dikelola secara profesional dapat berfungsi sebagai pilar penggerak kegiatan ekonomi di desa, memungkinkan masyarakat untuk memanfaatkan berbagai potensi lokal seperti pertanian, pariwisata, dan industri kreatif yang relevan dengan kondisi serta kebutuhan setempat (Furqoniah et al., 2021; Miroso Raharjo, Sucipto, Ishom, & Fatihin, 2024).

Tujuan pendirian BUMDes adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta memperkuat ekonomi lokal dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan keuangan desa. Setiap BUMDes diharapkan untuk berinovasi dan mengembangkan model usaha yang sesuai dengan potensi yang ada di desa tersebut. Hal ini termasuk perluasan jenis usaha yang tidak hanya fokus pada sektor tradisional tetapi juga menjangkau sektor-sektor baru yang lebih berkelanjutan dan inklusif,

dalam rangka mendorong partisipasi aktif masyarakat (Hamid & Yanita, 2022; Muzayyin Maq et al., 2024; Savitri, & Diyanto, 2022.).

Namun, tantangan yang dihadapi BUMDes dalam implementasinya sering kali terkait dengan kapasitas manajerial yang rendah serta kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan usaha (Wibisono & Panuntun, 2020.). Oleh karena itu, program pendampingan dan pelatihan pengelola BUMDes menjadi sangat penting untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola usaha, sehingga BUMDes dapat berfungsi secara optimal dan memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan ekonomi desa. Pendampingan ini meliputi aspek manajerial, perencanaan bisnis, serta teknologi informasi untuk mempermudah pelaporan dan pengelolaan keuangan (Lopes Amaral et al., 2022). Dalam konteks yang lebih luas, keberadaan BUMDes sejalan dengan tujuan pemerintah untuk menciptakan desa yang mandiri dan berkelanjutan, dengan memperkuat aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Keberhasilan BUMDes dalam mencapai tujuan ini juga bergantung pada tingkat partisipasi masyarakat dan dukungan dari pemerintah daerah dalam penyediaan sumber daya dan infrastruktur yang memadai. Dengan demikian, BUMDes tidak hanya berfungsi sebagai badan usaha, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang dapat meningkatkan mutu hidup masyarakat desa (Faedlulloh, 2018; Stiadi, 2021).

Kerangka kerja operasional BUMDes seringkali menunjukkan kesenjangan sistemik. Kebijakan dan mekanisme pendanaan yang ada mungkin belum cukup selaras dengan kebutuhan masyarakat, sehingga menyebabkan kegagalan dalam mencapai hasil ekonomi yang diharapkan (Arfah, Wahid, Tahir, & Busri, 2021). Usulan untuk memperkuat BUMDes melibatkan program pelatihan yang lebih baik bagi pengelola, di samping reformasi kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan akses keuangan dan keterlibatan masyarakat (Ramly, Wahyuddin, Mursyida, & Mawardati, 2018; Zainullah Hasan et al., 2022.). Meskipun BUMDes berpotensi meningkatkan kondisi ekonomi pedesaan Indonesia secara signifikan, efektivitasnya diimbangi oleh kualitas manajemen, keterlibatan masyarakat, dan kerangka kerja pemerintah yang suportif. Untuk memaksimalkan manfaat BUMDes, pendekatan yang mencakup pengembangan kapasitas, kemitraan strategis dengan UKM lokal, dan dukungan kebijakan yang kuat sangatlah penting.

Pendampingan penyusunan business plan berbasis potensi lokal pada BUMDes menjadi sangat urgen mengingat kelemahan perencanaan usaha masih menjadi kendala utama dalam pengelolaan ekonomi desa. Tanpa arah strategis yang jelas, BUMDes sering kesulitan menentukan prioritas usaha, mengantisipasi risiko, dan menjamin keberlanjutan ekonomi. Melalui business plan, potensi unik setiap desa dapat diidentifikasi dan dioptimalkan menjadi produk unggulan yang berdaya saing, sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan usaha. Dengan demikian, pendampingan ini tidak hanya memberi panduan operasional dan proyeksi keuangan yang terukur, tetapi juga memperkuat daya saing serta keberlanjutan BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi desa.

METODE KEGIATAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah sosialisasi yang dipadukan dengan pendekatan partisipatif melalui pelatihan klinik business plan. Metode ini melibatkan pengelola BUMDes dan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan, mulai dari mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi BUMDes, merencanakan strategi pengembangan usaha, hingga melaksanakan program pelatihan yang terstruktur. Sosialisasi dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya business plan dalam pengelolaan usaha desa, sedangkan pelatihan klinik dirancang untuk membekali peserta dengan keterampilan praktis dalam menyusun perencanaan usaha yang berbasis potensi lokal. Dengan pendekatan ini, kegiatan pengabdian tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga aplikatif karena mendorong keterlibatan langsung masyarakat dan pengelola BUMDes dalam menghasilkan dokumen business plan yang dapat diimplementasikan. Bagaimana sistem pengelolaan keuangan BUMDes dan potensi apa yang ada di desa yang dapat menambah penghasilan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi di desa. Metode ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan kegiatan:

1. Identifikasi Potensi Lokal Desa

Tahap awal dilakukan dengan menggali potensi sumber daya alam, manusia, dan peluang usaha desa. Identifikasi dilakukan dengan pengelola BUMDes/BUMDes Bersama se-Kabupaten Sumbawa Barat untuk memastikan potensi lokal terpetakan secara komprehensif.

2. Workshop Penyusunan Business Plan

Setelah potensi teridentifikasi, peserta mengikuti klinik BUMDes yang membahas konsep dasar business plan, struktur penyusunan, serta strategi pengembangan usaha berbasis potensi lokal.

3. Focus Group Discussion (FGD) bersama Stakeholder

FGD dilakukan untuk menyinergikan pandangan antara pengelola BUMDes, pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan pihak terkait lainnya, sehingga rancangan business plan mendapat masukan yang relevan dan aplikatif.

4. Pendampingan Intensif Penyusunan Dokumen Business Plan

Tim pengabdian mendampingi pengelola BUMDes secara langsung dalam merumuskan dokumen business plan yang mencakup analisis pasar, strategi operasional, aspek keuangan, dan proyeksi usaha.

5. Evaluasi dan Tindak Lanjut

Pada tahap akhir dilakukan evaluasi terhadap hasil penyusunan business plan untuk menilai kesesuaian dengan potensi lokal dan kebutuhan BUMDes. Selanjutnya disusun rencana tindak lanjut guna memastikan implementasi dan keberlanjutan dokumen yang dihasilkan..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelatihan klinik business plan terbukti meningkatkan pemahaman peserta mengenai tahapan penyusunan rencana usaha. Peserta diharapkan mampu mengidentifikasi potensi usaha, menyusun strategi pengembangan, hingga memahami dasar-dasar analisis pasar dan proyeksi keuangan. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang “Klinik BUMDes melalui Pendampingan Penyusunan Business Plan” dilakukan di Aula Gotong Royong Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Barat. Kegiatan ini dimulai dari tahap identifikasi potensi desa, workshop, FGD, pendampingan dan evaluasi.

Identifikasi Potensi Desa

Pada tahap awal, Klinik BUMDes melaksanakan kegiatan penggalian potensi yang dimiliki oleh desa-desa di Kabupaten Sumbawa Barat melalui proses identifikasi menyeluruh terhadap tiga aspek utama, yaitu sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), dan peluang usaha desa. Potensi SDA mencakup hasil pertanian, perikanan, peternakan, serta potensi wisata alam yang dapat dijadikan basis usaha desa, di mana setiap BUMDes diarahkan untuk menginventarisasi sumber daya khas yang memiliki nilai tambah jika diolah atau dipasarkan secara kolektif. Sementara itu, potensi SDM dipetakan melalui kapasitas masyarakat desa, keterampilan yang dimiliki, serta potensi wirausaha lokal, dengan hasil yang menunjukkan adanya tenaga kerja produktif yang dapat diarahkan untuk mendukung pengembangan usaha desa, termasuk keterlibatan kelompok perempuan dan pemuda. (Razaq et al., 2024) mengungkapkan bahwa kemampuan manajerial langsung berpengaruh terhadap kinerja pengurus BUMDes. Melalui peningkatan manajemen akan membantu BUMDes dalam merumuskan strategi yang lebih efektif dalam pengembangan usaha, termasuk inovasi dan adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat.

Selain itu, Klinik BUMDes juga mengidentifikasi peluang usaha yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan tren pasar, mencakup sektor jasa, perdagangan, pengolahan hasil pertanian, serta pengembangan produk unggulan desa. Proses identifikasi ini dilakukan melalui pertemuan dan diskusi bersama pengelola BUMDes/BUMDes Bersama se-Kabupaten Sumbawa Barat, sehingga data yang diperoleh mampu merefleksikan kondisi riil di lapangan dan menghasilkan peta potensi lokal yang komprehensif sebagai dasar dalam penyusunan strategi pengembangan usaha desa.

Tahapan awal Klinik BUMDes berfungsi sebagai fondasi strategis dalam pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan program BUMDes melalui identifikasi potensi lokal secara

komprehensif. Melalui keterlibatan aktif pengelola BUMDes, proses identifikasi dilakukan secara komprehensif, tidak hanya menyoroti potensi yang tampak, tetapi juga menggali potensi tersembunyi yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal, seperti hasil samping pertanian yang berpeluang diolah menjadi produk bernilai tambah. Di sisi lain, Klinik BUMDes menekankan pentingnya keterpaduan antara sumber daya alam (SDA) yang melimpah dengan sumber daya manusia (SDM) yang terampil, sehingga peningkatan kapasitas masyarakat menjadi aspek kunci agar pengelolaan potensi dapat dilakukan secara mandiri. Hasil identifikasi awal ini kemudian diwujudkan dalam bentuk peta potensi desa yang berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan, baik dalam menentukan prioritas program, jenis usaha yang dikembangkan, maupun bentuk intervensi yang diperlukan, seperti pelatihan, akses permodalan, dan penguatan kelembagaan. Lebih jauh, proses ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat desa bahwa pembangunan ekonomi seharusnya berangkat dari potensi lokal, sehingga mampu menumbuhkan kesadaran kolektif dan rasa kepemilikan (sense of ownership) terhadap usaha yang dijalankan oleh BUMDes. Beberapa studi kasus menunjukkan keberhasilan implementasi BUMDes dalam pembangunan ekonomi lokal. Misalnya, BUMDes Karya Mandiri di Purbalingga berhasil mengembangkan produk jahe yang meningkatkan ekonomi lokal serta kesadaran akan pertanian berkelanjutan (Pratiwi et al., 2022). Kasus serupa dapat ditemukan di wilayah lain yang memanfaatkan kerajinan dan pariwisata menunjukkan beragam potensi yang dapat meningkatkan ekonomi lokal (Setiawan et al., 2021). Dengan demikian, tahapan awal Klinik BUMDes bukan hanya sekadar inventarisasi data, melainkan langkah strategis untuk membangun perencanaan usaha desa yang berkelanjutan, berbasis potensi riil, serta didukung oleh partisipasi aktif seluruh pengelola BUMDes di Kabupaten Sumbawa Barat.

Workshop Klinik BUMDes yang membahas Business Plan

Peserta workshop memperoleh pemahaman mengenai pentingnya business plan sebagai dokumen strategis yang berfungsi untuk mengarahkan usaha BUMDes agar lebih terarah, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai penelitian (Athirah, Kristianto, Purnomo, & Ma'rifah, 2022; Suyanto, 2023; Susilo & Mahendri, 2021) pelatihan yang efektif dan bantuan dalam pengembangan rencana bisnis sangat penting untuk mengurangi tantangan operasional. Program yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan di antara para manajer BUMDes mengenai pembuatan rencana bisnis telah menunjukkan peningkatan dalam kapasitas BUMDes, yang menunjukkan bahwa pelatihan strategis dapat menjembatani kesenjangan dalam keterampilan manajerial yang penting untuk keberhasilan bisnis.

Dalam penyusunan business plan, beberapa komponen utama menjadi fokus pembahasan, antara lain analisis potensi desa yang mencakup sumber daya alam, sumber daya manusia, serta peluang pasar; perancangan model bisnis BUMDes yang menyesuaikan dengan kebutuhan desa dan permintaan pasar; penyusunan proyeksi keuangan yang meliputi rencana pendapatan, pengeluaran, dan estimasi keuntungan; strategi pemasaran dengan memanfaatkan pasar lokal, digital marketing, serta jejaring kemitraan; serta aspek legalitas dan tata kelola yang menekankan penguatan kelembagaan, transparansi, dan akuntabilitas. Dari hasil simulasi penyusunan, BUMDes diarahkan untuk lebih mengutamakan unit usaha yang berbasis pangan lokal sebagai wujud kontribusi nyata terhadap kebijakan ketahanan pangan nasional.

Disosialisasikan bahwa sesuai dengan arahan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Dana Desa dapat dimanfaatkan untuk mendukung program ketahanan pangan desa. Pemanfaatan tersebut mencakup pengembangan pertanian desa melalui penyediaan lahan pangan, irigasi sederhana, bibit unggul, dan pupuk organik; penguatan infrastruktur pangan seperti pembangunan lumbung desa, pasar desa, gudang, dan penyediaan alat pascapanen; pemberdayaan petani dan UMKM desa melalui kegiatan pelatihan, pendampingan, serta fasilitasi akses permodalan; serta diversifikasi produk pangan melalui pengembangan olahan pangan lokal dan unit usaha BUMDes berbasis pangan. Selain itu, program swasembada pangan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat juga didorong untuk mewujudkan kemandirian desa dalam penyediaan pangan. Penekanan utama dalam implementasi kebijakan ini adalah penerapan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan Dana Desa agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat desa. Business plan menjadi instrumen strategis yang memastikan setiap unit usaha

BUMDes dirancang secara terarah, realistis, dan sesuai potensi desa, sementara Dana Desa berperan sebagai sumber daya pendukung yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan rencana usaha tersebut, khususnya di sektor pangan. Sinergi antara perencanaan bisnis yang matang dan penggunaan Dana Desa yang tepat sasaran akan memperkuat posisi BUMDes sebagai penggerak ekonomi desa sekaligus pilar utama dalam mendukung ketahanan serta swasembada pangan nasional.

Akuntabilitas telah berkembang menjadi aspek fundamental dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) karena berhubungan langsung dengan keberlanjutan organisasi dan legitimasi sosialnya. Melati, Pudjianto, Sulisdiani, & Marini (2024), menegaskan bahwa praktik manajerial yang lemah dapat berimplikasi pada rendahnya transparansi, yang pada gilirannya memicu stagnasi operasional serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes. Temuan ini sejalan dengan Yakin, et al. (2019), yang menunjukkan bahwa defisit akuntabilitas dan perencanaan strategis kerap menjadi faktor penghambat utama dalam pencapaian tujuan pembangunan ekonomi desa. Dalam konteks ini, akuntabilitas tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif, melainkan juga sebagai instrumen penguatan tata kelola yang inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan lokal.

Kesadaran atas keterbatasan manajerial dapat menjadi titik tolak untuk merancang strategi pengembangan yang lebih responsif. Suyanto (2023), menekankan pentingnya perencanaan bisnis yang sistematis dalam memperbaiki efektivitas pengelolaan BUMDes. Dengan demikian, akuntabilitas bukan hanya bersifat normatif, tetapi juga menjadi prasyarat lahirnya inovasi sosial dan ekonomi yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat peran BUMDes sebagai motor penggerak pembangunan desa.

Focus Group Discussion (FGD) bersama Stakeholder

FGD yang dilaksanakan dengan melibatkan pengelola BUMDes, pemerintah, dan pihak terkait lainnya berlangsung dalam suasana partisipatif, di mana setiap stakeholder berkesempatan menyampaikan pandangan, pengalaman, serta harapan terkait pengembangan usaha BUMDes dan BUMDes Bersama.



Gambar 1. Workshop Klinik BUMDes dan BUMDes Bersama

Hasil FGD melalui penggunaan dana desa menunjukkan bahwa peran BUMDes dan BUMDes Bersama sangat erat kaitannya dengan alokasi dana desa yang diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Melalui diskusi, para stakeholder menegaskan bahwa dana desa tidak hanya digunakan untuk pembangunan fisik, tetapi juga harus diarahkan sebagai instrumen penguatan kelembagaan ekonomi desa melalui BUMDes. Pertama, pada aspek identifikasi potensi dan kebutuhan lokal, pengelola BUMDes menekankan pentingnya pemetaan potensi desa terutama sektor unggulan seperti pertanian, perkebunan, dan produk olahan lokal, sementara pemerintah desa menyoroti peran BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan asli desa. Kedua, terkait tantangan dan kendala yang dihadapi, ditemukan bahwa keterbatasan kapasitas manajerial dan sumber daya manusia masih menjadi hambatan utama, di samping minimnya akses modal, jaringan pemasaran, dan kemampuan digital marketing. Tokoh masyarakat juga mengingatkan adanya potensi resistensi sosial jika pengelolaan usaha tidak transparan

dan tidak melibatkan komunitas. Ketiga, pada aspek harapan dan masukan terhadap rancangan business plan, disepakati bahwa business plan harus disusun realistis, namun tetap aplikatif sesuai kondisi desa, dengan model usaha berbasis potensi lokal yang memiliki nilai tambah dan berorientasi pasar. Selain itu, pihak terkait menekankan perlunya sinergi antara BUMDes, pemerintah desa, dan jejaring eksternal seperti koperasi, lembaga keuangan, maupun mitra usaha.

Penyusunan business plan BUMDes dan BUMDes Bersama harus mengintegrasikan potensi lokal dengan kebutuhan pasar. Masukan stakeholder mengindikasikan adanya kesenjangan kapasitas manajemen dan akses pasar yang perlu ditangani melalui strategi pendampingan serta penguatan kelembagaan. Selain itu, dana desa diharapkan dapat mendorong kolaborasi dengan jejaring eksternal seperti koperasi, lembaga keuangan, dan mitra usaha, sehingga dampak ekonomi dapat lebih luas. Dengan pola ini, dana desa berfungsi sebagai katalis yang memperkuat BUMDes dan BUMDes Bersama sebagai motor penggerak ekonomi desa sekaligus wadah pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks ini, keterlibatan multi-stakeholder menjadi kunci sinergi, karena partisipasi aktif dari pengelola BUMDes, pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan pihak eksternal dapat meningkatkan legitimasi dan keberlanjutan usaha. Lebih jauh, keterlibatan masyarakat juga sangat penting agar BUMDes tidak hanya dipandang sebagai unit usaha milik pemerintah desa, tetapi benar-benar menjadi milik bersama. Selain itu, aspek transparansi dan akuntabilitas menjadi sorotan utama, di mana sistem pelaporan yang terbuka akan menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat dukungan sosial terhadap pengembangan usaha.

Partisipasi multi-stakeholder memiliki sejumlah manfaat signifikan. Pertama, legitimasi usaha desa dapat diperkuat melalui keikutsertaan komunitas lokal dalam proses pengambilan keputusan. Stiadi (2021), menegaskan bahwa individu atau kelompok yang terlibat dalam proses cenderung memiliki sikap yang lebih positif terhadap hasil yang dicapai, sehingga risiko penolakan maupun konflik dapat diminimalisasi. Kedua, keterlibatan pihak eksternal, seperti organisasi non-pemerintah (NGO), akademisi, maupun investor, mampu memperkaya sumber daya, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan dalam pengelolaan serta pengembangan BUMDes. Kolaborasi dengan lembaga riset, misalnya, memungkinkan eksplorasi potensi lokal yang mungkin tidak teridentifikasi sebelumnya. Ketiga, platform multi-stakeholder juga dapat menjadi wadah pembelajaran dan inovasi. Perspektif beragam yang dibawa oleh para pemangku kepentingan berkontribusi terhadap lahirnya solusi kreatif dan relevan terhadap tantangan yang dihadapi. Penelitian yang dilakukan oleh (Arfah, Wahid, Tahir, & Busri, 2021) terhadap sejumlah BUMDes menunjukkan bahwa keterlibatan aktif masyarakat, disertai dukungan pemerintah lokal, secara nyata meningkatkan pendapatan BUMDes sekaligus memperkuat keberlanjutan usaha. Temuan tersebut menegaskan bahwa tata kelola partisipatif merupakan faktor determinan dalam pencapaian kinerja optimal.

Pendampingan Intensif Penyusunan Dokumen Business Plan

Kegiatan Pendampingan Intensif Penyusunan Dokumen Business Plan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas peserta dalam menyusun dokumen rencana bisnis yang terstruktur, komprehensif, dan dapat dijadikan acuan dalam pengembangan usaha. Pendampingan dilakukan mulai dari tahap pengenalan template business plan, pengisian setiap komponen dokumen, hingga penyusunan proyeksi keuangan yang realistis. Kegiatan pendampingan menghasilkan beberapa capaian utama. Pertama, seluruh peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai struktur dan komponen utama yang harus ada dalam sebuah dokumen business plan. Template yang disediakan memuat bagian-bagian penting seperti ringkasan eksekutif, profil usaha, analisis pasar, strategi pemasaran, aspek operasional, struktur organisasi, serta aspek keuangan. Dengan adanya template ini, peserta lebih mudah menuliskan ide dan rencana usaha dalam bentuk dokumen yang sistematis. Kedua, melalui proses pendampingan yang dilakukan secara bertahap, peserta tidak hanya mengisi dokumen, tetapi juga didorong untuk melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap usaha mereka. Diskusi, bimbingan, dan umpan balik yang diberikan selama kegiatan membuat peserta dapat memperbaiki isi dokumen sesuai kondisi riil usaha. Hasilnya, setiap peserta mampu menghasilkan dokumen business plan final yang lengkap dan siap digunakan sebagai instrumen pengembangan usaha. Ketiga, salah satu capaian penting dari kegiatan ini adalah tersusunnya proyeksi keuangan oleh masing-masing peserta. Peserta dilatih menyusun proyeksi arus kas, laporan laba rugi, serta neraca usaha dengan asumsi-asumsi

yang disesuaikan dengan kapasitas bisnis. Proyeksi disusun untuk jangka waktu 1 hingga 3 tahun dengan memperhatikan beberapa skenario, baik optimis, moderat, maupun pesimis.

Pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan bahwa penyusunan dokumen business plan bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah proses strategis yang membantu pelaku usaha memahami posisi dan potensi bisnis mereka secara lebih jelas. Melalui pendampingan, peserta menyadari bahwa rencana bisnis yang baik mampu menjadi alat komunikasi dengan calon mitra, investor, maupun lembaga keuangan, sekaligus berfungsi sebagai panduan internal dalam mengelola usaha. Namun demikian, proses penyusunan dokumen juga menemukan sejumlah tantangan. Beberapa peserta mengalami kesulitan dalam menyusun analisis pasar berbasis data karena keterbatasan akses terhadap informasi yang akurat. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan kapasitas riset pasar sederhana, sehingga peserta dapat menggunakan data yang lebih valid dalam perencanaan bisnis. Selain itu, pada aspek keuangan, ditemukan bahwa sebagian besar peserta masih mencampurkan antara keuangan pribadi dan usaha, sehingga menyulitkan dalam membuat proyeksi yang lebih presisi. Peserta terdorong untuk berpikir kritis terhadap kelayakan usaha mereka dan belajar mengaitkan antara analisis pasar, strategi pemasaran, serta implikasinya terhadap proyeksi keuangan. Melalui metode learning by doing, peserta tidak hanya memperoleh teori, tetapi juga langsung mempraktikkan penyusunan business plan sesuai dengan kebutuhan masing-masing usaha. Hal ini memperkuat daya guna dari dokumen yang dihasilkan.

Dokumen business plan yang dihasilkan dari kegiatan ini berpotensi digunakan oleh peserta sebagai dasar dalam pengambilan keputusan strategis, pengajuan pendanaan, maupun pengembangan kemitraan bisnis. Dengan adanya proyeksi keuangan, peserta juga dapat mengantisipasi risiko dan merancang strategi mitigasi sejak dini. Ke depan, kegiatan serupa dapat diperkaya dengan tambahan materi mengenai studi kelayakan (feasibility study), strategi digital marketing, serta pengelolaan risiko usaha agar pendampingan lebih komprehensif.



Gambar 2: Workshop Klinik BUMDes dan BUMDes Bersama

Evaluasi

Evaluasi akhir ini menjadi tahap penting dalam memastikan kualitas dokumen business plan yang disusun. Dengan menekankan pada kesesuaian dengan potensi lokal, kegiatan ini membantu BUMDes agar tidak sekadar menyalin format rencana bisnis umum, melainkan menyusunnya secara kontekstual sesuai dengan kekayaan sumber daya yang ada di desa. Hal ini sejalan dengan prinsip pemberdayaan masyarakat desa, di mana pengelolaan usaha harus berbasis pada kearifan lokal dan kebutuhan nyata masyarakat. Pembahasan terhadap hasil evaluasi juga menunjukkan adanya tantangan yang masih perlu diatasi. Pertama, beberapa BUMDes belum memiliki data pasar yang memadai sehingga analisis permintaan dan daya saing masih bersifat deskriptif. Kedua, aspek manajemen keuangan masih menjadi titik lemah yang perlu diperkuat melalui pelatihan lanjutan. Ketiga, implementasi business plan akan sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan dan komitmen pengelola BUMDes dalam menjalankan rencana yang telah disusun.

Rencana tindak lanjut yang disusun menjadi instrumen penting untuk menjamin keberlanjutan. Dengan adanya jadwal implementasi, indikator kinerja, serta mekanisme monitoring, setiap BUMDes diharapkan dapat mengukur perkembangan usahanya secara objektif. Selain itu, adanya peran Klinik BUMDes sebagai fasilitator akan memperkuat proses pendampingan berkelanjutan, sehingga BUMDes tidak berjalan sendiri dalam mengimplementasikan rencana bisnis yang telah dibuat.

Secara keseluruhan, tahap evaluasi dan penyusunan rencana tindak lanjut ini menegaskan bahwa keberhasilan penyusunan business plan tidak hanya terletak pada dokumen yang dihasilkan, tetapi juga pada sejauh mana dokumen tersebut diimplementasikan dalam praktik usaha. Keterkaitan dengan potensi lokal dan kebutuhan desa menjadi kunci utama, sementara tindak lanjut yang terencana akan memastikan keberlanjutan serta peningkatan kinerja BUMDes dan BUMDes Bersama.

Melalui evaluasi yang tepat dan perencanaan tindak lanjut yang komprehensif, organisasi dapat memastikan bahwa bisnis tidak hanya dapat memulai dengan baik tetapi juga bertahan dan berkembang dalam lingkungan yang kompetitif. Pendekatan ini mengakui bahwa proses adalah kunci dalam manajemen bisnis dan memberikan fondasi yang kuat untuk pertumbuhan yang berkelanjutan (Wetter, J., 2021).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pendampingan melalui Klinik BUMDes terbukti memiliki peran strategis dalam membantu penyusunan business plan yang berbasis pada potensi lokal desa. Proses pendampingan tidak hanya menghasilkan dokumen formal, tetapi juga meningkatkan kapasitas pengelola BUMDes dalam memahami aspek bisnis, strategi pemasaran, dan pengelolaan keuangan secara lebih komprehensif. Dokumen business plan yang dihasilkan dari kegiatan ini menjadi pedoman penting bagi BUMDes dan BUMDes Bersama untuk mengembangkan unit usaha secara lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan. Dengan demikian, keberadaan Klinik BUMDes dapat dipandang sebagai mitra strategis dalam mendorong transformasi kelembagaan desa menuju pengelolaan usaha yang profesional dan berdaya saing.

Klinik BUMDes memiliki peran strategis dalam mendampingi penyusunan business plan berbasis potensi lokal, yang terbukti mampu meningkatkan kapasitas pengelola dalam memahami aspek bisnis, pemasaran, dan keuangan. Dokumen yang dihasilkan tidak hanya menjadi syarat administratif, tetapi juga pedoman penting bagi pengembangan usaha BUMDes yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan. Untuk menjamin keberhasilan, diperlukan pelatihan lanjutan, implementasi yang disertai monitoring, perluasan kolaborasi multi-pihak, serta penguatan tata kelola kelembagaan agar BUMDes mampu berkembang secara profesional dan dipercaya masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa telah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan, pengurus BUMDes yang berpartisipasi aktif dalam setiap tahap, serta rekan-rekan tim pengabdian yang bekerja dengan penuh dedikasi. Dukungan dan kolaborasi seluruh pihak sangat berarti bagi keberhasilan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfah, S. R., Wahid, N., Tahir, N., & Busri, B. (2021). Analysis of Village-Owned Enterprises (BUMDes) development strategy in increasing village own-source revenue in Bantimurung, Maros Regency. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 10(2), 281–292. <https://doi.org/10.31314/pjia.10.2.281-292.2021>
- Athirah, S. I., Kristianto, F. P., Purnomo, D. E. H., & Ma'rifah, J. D. (2022). Usaha peningkatan kualitas BUMDes Berdikari Pucang melalui pelatihan business plan. *Sewagati*, 6(4), 1–5. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i4.359>
- Faedlulloh, D. (2018). BUMDes dan kepemilikan warga: Membangun skema organisasi partisipatoris. *Journal of Governance*, 3(1), 1–17. <https://doi.org/10.31506/jog.v3i1.3039>
- Furqoniah, F., Adietya, Hetami, A., Hera, Handayani, T., & Syafitri. (2021). Optimalisasi usaha BUMDes Mulya Bersama melalui peningkatan kualitas produk UMKM Desa Mulawarman. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 25–34.
- Hamid, E., & Yanita, M. (2022). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat. *Jurnal Ilmiah Sosio-Ekonomika Bisnis*, 25(01), 45–56. <https://doi.org/10.22437/jiseb.v25i01.18921>
- Hariato, A., Bhastary, M. D., Pakpahan, D. R., Razaq, R. (2024). Kepemimpinan perusahaan dan modal intelektual terhadap kinerja keuangan BUMDes: Kemampuan inovasi sebagai variabel pemoderasi. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)*, 4(1), 12–25.
- Hestiana, A. (2024). Analisis kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Gelombang Kecamatan Semidang Alas Maras (SAM) Kabupaten Seluma. *Journal of Governance and Public Administration (JOGAPA)*, 1(1), 88–101.
- Lopes Amaral, M. A., Ketmoen, A., Sinlae, A. A. J., Boelan, E. G., Baunsele, A. B., & Ratumakin, P. A. K. L. (2022). Pelatihan keuangan BUMDes: Penyusunan proposal usaha di Kecamatan Kupang Barat. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)*, 5(11), 3789–3798. <https://doi.org/10.33024/jkpm.v5i11.7516>
- Melati, S. S., Pudjianto, S. Y., Sulisdiani, I., & Marini, M. (2024). Accountability for management of Village-Owned Enterprises (BUMDes) Tanjung Raya in Boyan Tanjung Village, Boyan Tanjung District, Kapuas Hulu Regency. *Pancasila International Journal of Applied Social Science*, 2(02), 174–182. <https://doi.org/10.59653/pijass.v2i02.730>
- Miroso Raharjo, K., Sucipto, S., Ishom, M., & Fatihin, M. K. (2024). Peningkatan kapasitas pengelola BUMDes dalam mengembangkan produk unggulan desa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 4(1), 115–121. <https://doi.org/10.52436/jpmi.v4i1.1350>
- Muzayyin Maq, M., Puspita Dewi, S., Suningrat, N., & Wilson Sitopu, J. (2024). Pendampingan balai desa dalam mengembangkan BUMDes untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. *Joni Wilson Sitopu Journal of Human and Education*, 4(5), 185–191. <https://doi.org/10.31004/jhhe.v4i5.432>
- Pratiwi, R., et al. (2022). Inovasi produk BUMDes dalam pembangunan desa: Studi kasus di Purbalingga. *Jurnal Agribisnis dan Pengembangan Wilayah*, 8(1), 45–60.
- Ramly, A. R., Wahyuddin, W., Mursyida, J., & Mawardati, M. (2018). The implementation of village fund policy in improving economy of village society. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 6(3), 459–472. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v6i3.326>
- Rohaya, N. (2021). Lembaga perekonomian desa dan Badan Usaha Milik Desa sebagai upaya penguatan ekonomi desa. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 2(1), 55–68. <https://doi.org/10.31000/ijlps.v2i1.4398>
- Savitri, E., & Diyanto, V. (2022). Facilitation of web-base BUMDes financial reporting. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 6(1), 112–120.
- Setiawan, I., et al. (2021). Pengembangan destinasi pariwisata melalui BUMDes: Peluang dan tantangan. *Jurnal Pariwisata Indonesia*, 2(2), 78–89.
- Stiadi, E. (2021). Studi komperatif pemberdayaan masyarakat berbasis partisipasi melalui Badan Usaha Milik Desa (Panggungharjo, Canden, Dlingo Dan Tirtoharjo) Kabupaten Bantul. *Jurnal*

-
- Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)*, 1(3), 154–168. <https://doi.org/10.18196/jpk.v1i3.11652>
- Susilo, D. E., & Mahendri, W. (2021). Sosialisasi business plan meningkatkan kapasitas BUMDes Sari Artha Bareng Jombang. *Jurnal Abdimas Ilmiah Citra Bakti*, 2(1), 90–97. <https://doi.org/10.38048/jailcb.v2i1.196>
- Suyanto. (2023). Persuasive assistance and problem-solving for the establishment of village-owned enterprises. *EQUALEGUM International Law Journal*, 1(2), 110–115.
- Wetter, J. (2021). Business plan evaluation strategies: A comprehensive guide. *Journal of Business Research*, 134, 112–121. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.05.021>
- Wibisono, A. F., & Panuntun, B. (2020). Optimalisasi fungsi BUMDes melalui inovasi dan manajemen organisasi sebagai upaya meningkatkan kemandirian desa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2(2), 44–58.
- Yakin, A., Sukardi, S., Amiruddin, A., & Sa'diyah, H. (2019). Peningkatan kapasitas BUMDes dalam penyusunan business plan bagi pengelolaan kawasan ekowisata hutan berkelanjutan di Desa Sesaot Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Ilmiah Abdi Mas TPB Unram*, 1(1), 35–45.
- Zainullah Hasan, A., Aromatica, D., Koeswara, H., & Andalas, U. (2022). Pengembangan kapasitas pada Badan Usaha Milik Desa Lembengan Sejahtera Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(3), 2022–2031.